



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pembangunan daerah telah ditetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai penentu arah sasaran dan tujuan pembangunan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk memperoleh hasil (outcome) pada indikator dan target kinerja yang relevan dan terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah serta Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 20 Pebruari 2017 Nomor 065/062/418.09/2017 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Tim SAKIP membahas Hasil Bimbingan Teknis SAKIP dan membahas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 10 Juli 2017 Nomor 065/1876/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Draf Peraturan Bupati Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 -2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 – 2021;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kediri .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri .
3. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
4. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kediri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah dalam rangka untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 3

Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri bertujuan untuk :

- a. Memperoleh hasil (outcome) pada indikator dan target kinerja yang lebih relevan dan terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis; dan
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang lebih relevan dan terukur sesuai tujuan dan sasaran strategis.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat diberikan tugas melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap instansi pemerintah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Organisasi tanggal 20 Pebruari 2017 Nomor 065/062/418.09/2017 perihal Laporan terkait Rapat Tim SAKIP membahas Hasil Bimbingan Teknis SAKIP dan membahas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 10 Juli 2017 Nomor 065/1876/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Draf Peraturan Bupati Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021, dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 - 7 - 2017

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 - 7 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


H. SUKADI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
 TAHUN 2016 - 2021**

Keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021, dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Visi : “Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung Ooleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

| Tujuan | Indikator Tujuan | Kondisi Awal | Target Capaian per tahun | | | | | | Kondisi Akhir | |
|--|---|--|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| Misi 1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. | | | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama | Jumlah kasus konflik berlatar belakang agama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misi 2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan | | | | | | | | | | |
| 2. | Terwujudnya kemandirian menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan | Nilai Pola Pangan Harapan | 87,9 | 87,9 | 88,4 | 88,9 | 89,4 | 89,9 | 90,4 | 90,4 |
| Misi 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman | | | | | | | | | | |
| 3. | Meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan keamanan di masyarakat | Angka kemiskinan | 12,90 | 12,67 | 12,44 | 12,21 | 11,98 | 11,75 | 11,52 | 11,52 |
| Misi 4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan | | | | | | | | | | |
| 4. | Meningkatkan kualitas pendidikan dengan biaya murah (terjangkau) serta meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan formal, non formal dan informal | Angka Rata-rata lama sekolah | 7,44 | 7,68 | 8,08 | 8,10 | 8,15 | 8,29 | 8,43 | 8,43 |
| | | APK | | | | | | | | |
| | | - SD/MI | 108,85 | 109,69 | 109,69 | 109,72 | 109,80 | 109,85 | 109,90 | 109,90 |
| | | - SMP/MTs | 95,68 | 99,68 | 99,68 | 99,70 | 99,73 | 99,80 | 99,83 | 99,83 |
| | | APM | | | | | | | | |
| | | - SD/MI | 99,48 | 99,81 | 99,83 | 99,85 | 99,90 | 99,93 | 99,95 | 99,95 |
| - SMP/MTs | 76,14 | 78,34 | 78,40 | 78,50 | 78,75 | 80 | 80,25 | 80,25 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Kondisi Awal | Target Capaian per tahun | | | | | Kondisi Akhir | | |
|--|---|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | |
| Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan | | | | | | | | | | |
| 5. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka usia harapan hidup | 72,10 | 72,23 | 72,32 | 72,41 | 72,50 | 72,59 | 72,68 | 72,68 |
| Misi 6. Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro | | | | | | | | | | |
| 6. | Mengembangkan Kreativitas, Produktivitas Dan Pendapatan Masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah | PDRB per kapita (juta rupiah) | 15,61 | 16,24 | 16,98 | 17,86 | 18,84 | 19,92 | 21,13 | 21,13 |
| | | Angka pertumbuhan ekonomi | 4,97 | 5,18 | 4,98 | 5,20 | 5,42 | 5,66 | 5,91 | 5,91 |
| Misi 7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah | | | | | | | | | | |
| 7. | Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah serta meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sistem inovasi daerah | PDRB ADHB (juta rupiah) | 30.704.888,94 | 33.317.802,45 | 36.409.162,64 | 39.753.613,02 | 43.672.386,12 | 48.200.267,02 | 53.477.278,68 | 53.477.278,68 |
| Misi 8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomikerakyatan | | | | | | | | | | |
| 8. | Meningkatkan keberlanjutan kerjasama antara koperasi, pemerintah dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Persentase koperasi sehat | 87 | 87,10 | 87,20 | 87,30 | 87,40 | 87,50 | 87,60 | 87,60 |
| Misi 9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha | | | | | | | | | | |
| 9. | Meningkatnya iklim investasi | Persentase nilai investasi | 7,12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Misi 10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan | | | | | | | | | | |
| 10. | Meningkatkan kualitas masyarakat menuju masyarakat partisipatif dengan pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan | CBR | 16,85 | 16,52 | 16,18 | 15,58 | 15,51 | 15,18 | 14,84 | 14,84 |
| | | IPG | 91,99 | 92,03 | 92,07 | 92,12 | 92,16 | 92,20 | 92,24 | 92,24 |
| Misi 11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi | | | | | | | | | | |
| 11. | Menciptakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional | Indeks Reformasi Birokrasi | D | D | D | C | C | CC | CC | CC |
| Misi 12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang | | | | | | | | | | |
| 12. | Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur guna menunjang Percepatan Pembangunan | Persentase infrastruktur daerah dalam kondisi baik | 86 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Kondisi Awal | Target Capaian per tahun | | | | | Kondisi Akhir | | |
|---|--|--|--------------------------|------|------|------|------|---------------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | |
| Misi 13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi | | | | | | | | | | |
| 13. | Mengembangkan Jaringan Komunikasi dan Informasi | Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi | 66 | 66 | 70 | 73 | 82 | 91 | 100 | 100 |
| Misi 14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang | | | | | | | | | | |
| 14. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | - | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 65 |
| Misi 15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat | | | | | | | | | | |
| 15. | Memberdayakan tenaga kerja sehingga terampil dan berwawasan sebagai upaya menjadikan tenaga kerja yang bermartabat dan berdaya saing | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 5,02 | 5,10 | 5 | 4,90 | 4,83 | 4,75 | 4,64 | 4,64 |

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut :

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi Awal | Target Capaian per tahun | | | | | | Kondisi Akhir | | |
|--|--|--|--|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| Misi 1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman | Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti | Σ penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti / Σ konflik berlatar belakang agama X 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Misi 2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Meningkatnya kualitas sarana irigasi guna mendukung produksi dan produktivitas pertanian | Persentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Panjang saluran irigasi kondisi baik/panjang saluran irigasi keseluruhan X 100% | 87,06 | 77 | 77,5 | 78,25 | 79,25 | 80,50 | 82 | 82 | |
| 3. | Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat | Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun) | (Rata-rata Σ ketersediaan pangan utama (beras) dlm 1 th/jml penduduk) dalam kg/kapita/tahun | 134,92 | 134,92 | 136,27 | 137,63 | 139,01 | 140,40 | 141,80 | 141,80 | |
| 4. | Meningkatnya produksi bahan pangan utama | Nilai produksi bahan pangan utama | Σ produksi bahan pangan utama | 814.108 | 815.421 | 816.450 | 819.000 | 822.200 | 824.500 | 826.000 | 826.000 | |
| 5. | Meningkatnya produksi hasil perkebunan | Nilai produksi perkebunan | Σ produksi hasil perkebunan | 238.158 | 238.158 | 238.163 | 238.170 | 239.270 | 239.380 | 239.480 | 239.480 | |
| 6. | Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan | Persentase peningkatan produksi peternakan | $(\Sigma$ produksi hasil peternakan tahun ini - Σ produksi hasil peternakan tahun lalu) / Σ produksi hasil peternakan tahun lalu X 100% | 0,63 | 14,77 | 1,04 | 0,68 | 0,78 | 0,65 | 0,73 | 0,73 | |
| | | | | - Daging | 0,55 | 47,29 | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,95 |
| | | | | - Telur | 0,64 | 33,16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Persentase peningkatan produksi perikanan | $(\Sigma$ produksi ikan tahun ini - Σ produksi ikan tahun lalu) / Σ produksi ikan tahun lalu X 100% | 6,86 | 0,81 | 4,12 | 12,01 | 16,05 | 5,49 | 4,5 | 4,5 | |
| | | | | - Kolam | 1,43 | 4,97 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| | | | | - Perairan umum | | | | | | | | |
| Misi 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial | Persentase jumlah PMKS yang ditangani | Jumlah PMKS yang ditangani/Jumlah PMKS yang ada X 100% | 20,61 | 20,61 | 21,12 | 21,64 | 22,18 | 22,73 | 23,29 | 23,29 | |
| 8. | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku | Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup | $(\Sigma$ pelanggaran Perda Perbup tahun lalu - Σ pelanggaran Perda Perbup tahun ini) / Σ pelanggaran perda dan perbup tahun lalu X 100% | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 95 | 95 | |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi Awal | Target Capaian per tahun | | | | | | Kondisi Akhir | |
|---|---|---|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 9. | Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Desa Tangguh Bencana | Σ Desa Tangguh Bencana | - | - | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Misi 4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan | | | | | | | | | | | |
| 10. | Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan | Angka harapan lama sekolah | $HLS_a^t = FK \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan: HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t : Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t : Jumlah penduduk usia pada tahun t I : usia ($a, a+1, \dots, n$) FK : Faktor koreksi pesantren</p> | 12,14 | 12,48 | 13,07 | 13,11 | 13,21 | 13,43 | 13,65 | 13,65 |
| Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan | | | | | | | | | | | |
| 11. | Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat | Angka Kematian Ibu | Σ wanita yang meninggal mulai dari saat hamil sampai 6 minggu setelah persalinan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/ Σ bayi lahir hidup di suatu wilayah pada kurun waktu sama X100.000 kelahiran hidup | 68,71 | 68,79 | 65,36 | 61,87 | 58,30 | 58,30 | 41,64 | 41,64 |
| | | Angka Kematian Bayi | Σ kematian bayi berusia di bawah 1 tahun di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/ Σ bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama X 1000 kelahiran hidup | 7,5 | 7,61 | 7,68 | 7,42 | 7,29 | 7,08 | 6,87 | 6,87 |
| Misi 6. Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro | | | | | | | | | | | |
| 12. | Meningkatnya sektor industri | Angka pertumbuhan industri | Angka pertumbuhan industri (unit) | 2.129 | 3.300 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | 3.500 | 3.550 | 3.550 |
| Misi 7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah | | | | | | | | | | | |
| 13. | Mengembangkan industri pariwisata untuk memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah | Jumlah kunjungan wisata | Σ kunjungan wisatawan tahun berkenaan | 1.603.679 | 1.490.866 | 1.723.892 | 1.959.964 | 2.198.352 | 2.438.611 | 2.680.440 | 2.680.440 |
| | | Persentase kelompok seni budaya yang diberdayakan | Σ grup yang diberdayakan/ Σ grup terdaftar X 100% | 40 | 40 | 42,50 | 45 | 47,50 | 50 | 52,50 | 52,50 |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi Awal | Target Capaian per tahun | | | | | Kondisi Akhir | |
|--|---|--|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 |
| Misi 8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan | | | | | | | | | | |
| 14. Meningkatkan Kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatkannya kesempatan berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat | Persentase koperasi aktif | Σ koperasi aktif/ Σ koperasi X 100% | 68,07 | 68,25 | 69 | 69,50 | 70 | 70,50 | 71 | 71 |
| | Persentase pertumbuhan usaha mikro | Σ UM tahun ini- Σ UM tahun lalu/ Σ UM tahun dasar | 0,68 | 1,03 | 1,58 | 2,03 | 2,48 | 2,93 | 3,39 | 3,39 |
| Misi 9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha | | | | | | | | | | |
| 15. Meningkatkan investasi di daerah | Nilai Realisasi Investasi (milyar rupiah) | Nilai Realisasi Investasi (milyar rupiah) | 418,259894 | 460,085883 | 473,888460 | 488,105114 | 502,748267 | 517,830715 | 533,365637 | 533,365637 |
| Misi 10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan | | | | | | | | | | |
| 16. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana | Prevalensi peserta KB Aktif | Σ peserta KB Aktif X 100% pasangan usia subur | 70,81 | 71,09 | 71,37 | 71,66 | 71,94 | 72,22 | 72,50 | 72,50 |
| 17. Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | $1/3[\text{Ipar}+\text{IDM}+\text{linc-dist}]$ | 74,09 | 74,09 | 74,19 | 74,24 | 74,29 | 72,34 | 74,39 | 74,39 |
| 18. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan | Persentase BUMDes yang aktif | Σ BUMDes yang aktif X 100% Σ BUMDes seluruhnya | - | 1,7 | 4,6 | 6,9 | 9,3 | 11,6 | 13,9 | 13,9 |
| | Jumlah desa tertinggal | Σ desa tertinggal | 113 | 113 | 111 | 109 | 1107 | 105 | 103 | 103 |
| Misi 11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi | | | | | | | | | | |
| 19. Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP | CC | CC | B | B | BB | BB | A | A |
| 20. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan | Hasil nilai IKM (Indeks kepuasan masyarakat) | Nilai capaian IKM dalam pelayanan | 80 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 21. Meningkatkan profesionalitas ASN | Indeks Profesionalitas ASN | Σ IP ASN seluruh unit organisasi Σ unit organisasi | - | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 86 |
| Misi 12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang | | | | | | | | | | |
| 22. Meningkatkan sarana infrastruktur daerah | Persentase jalan dengan kondisi baik | Panjang jalan dengan kondisi baik/panjang jalan kabupaten X 100% | 86 | 86 | 89 | 90,5 | 92,5 | 93 | 95 | 95 |
| | Persentase jembatan kabupaten dengan kondisi baik | Σ jembatan kabupaten dengan kondisi baik/ Σ jembatan kabupaten yang ada X 100% | 77,85 | 77,85 | 79 | 83 | 84,5 | 86 | 89,5 | 89,5 |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi Awal | Target Capaian per tahun | | | | | | Kondisi Akhir | |
|---|--|---|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak | Σ penduduk pengguna air minum yang memenuhi syarat/ Σ penduduk X 100% | 50 | 54 | 65 | 75 | 85 | 90 | 95 | 95 | |
| | Persentase penurunan luasan kawasan kumuh | Luas kawasan kumuh yang ditangani/luas kawasan kumuh yang ada X 100% | 100 | 100 | 75 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | |
| 23. | Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan | - | 74,62 | 75 | 75,50 | 76 | 76,50 | 77 | 77 | |
| | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan | Σ pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan/ Σ pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan yang seharusnya X 100% | - | 82,50 | 84,09 | 86,99 | 87,46 | 88,11 | 88,50 | 88,50 | |
| Misi 13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi | | | | | | | | | | | |
| 24. | Meningkatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah | Σ kumulatif sistem informasi yang dibangun | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Misi 14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang | | | | | | | | | | | |
| 25. | Menurunnya beban pencemaran lingkungan | Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan | (Beban pencemaran lingkungan tahun lalu - beban pencemaran lingkungan tahun ini)/beban pencemaran lingkungan tahun lalu X 100% | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 26. | Meningkatnya penataan dan pemanfaatan kawasan daerah sesuai rencana tata ruang | Angka luasan RTH KP publik terbangun di wilayah perkotaan | Luasan RTH KP publik kawasan perkotaan yang terbangun (ha) | 8,325 | 8,402 | 8,702 | 9,002 | 9,302 | 9,602 | 9,902 | 9,902 |
| Misi 15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat | | | | | | | | | | | |
| 27. | Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja | Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerja | Angkatan Kerja 15 th ke atas/jumlah penduduk usia 15 th ke atas X 100% | - | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 67 |
| 28. | Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja | Persentase Peningkatan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek | Σ perusahaan yang menerapkan norma jamsostek tahun ini - tahun lalu/tahun lalu x 100% | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 |

Selanjutnya, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 menjadi dasar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut :

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|---|--|---|---|-------|---------|-------------------|--|---|--|---------------------|----|--|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| Misi 1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kegiatan keagamaan, olahraga dan sosial | Persentase rumusan kebijakan keagamaan, olahraga dan sosial yang difasilitasi | Σ rumusan kebijakan keagamaan, olahraga dan sosial yang difasilitasi /kegiatan fasilitasi yang direncanakan X 100% | 86,3 | 96,6 | 1 | Terwujudnya rumusan kebijakan keagamaan, olahraga dan sosial | % rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang keagamaan | Σ rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang keagamaan yang difasilitasi/ Σ kebijakan di bidang keagamaan X 100% | 88 | 96 | Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat |
| | | | | | | | | % rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial | Σ rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang sosial yang difasilitasi/ Σ kebijakan di bidang sosial X 100% | 86 | 97 | |
| | | | | | | | | % rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang olahraga | Σ rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang olahraga yang difasilitasi/ Σ kebijakan di bidang olahraga X 100% | 85 | 95 | |
| 2 | Meningkatnya kerukunan hidup antar umat beragama | Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti | Σ penanganan konflik berlatar belakang agama yang ditindaklanjuti/ Σ konflik berlatar belakang agama X 100% | 100 | 100 | 1 | Terbangunnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan | Persentase tingkat pengetahuan dasar wasbang peserta | (Peningkatan nilai hasil post tes-pre tes peserta wasbang dalam setiap kegiatan sosialisasi)/ Σ peserta kegiatan X 100% | 60 | 70 | Bakesbangpol |
| | | | | | | | | Persentase tingkat partisipasi aktif tokoh agama dalam penanganan konflik dan memelihara kehidupan umat beragama yang harmonis, rukun dan damai | (Anggota FKUB yang aktif dalam kegiatan bersosialisasi/ Σ anggota seluruh FKUB) X 100% | 65 | 75 | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|--|---|---|---|-------|---------|--|---|---|--|---------------------|-----------|-----------------|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| | | | | | 2 | Terciptanya ketertiban, ketentraman dan keamanan yang berbasis pada kesadaran dan partisipasi masyarakat | Persentase penurunan kejadian konflik terkait poleksosbud dan ketertiban masyarakat | $(\sum \text{konflik yang terfasilitasi} / \sum \text{konflik yang terjadi}) \times 100\%$ | 60 | 60 | | |
| | | | | | | | Persentase terbentuknya FKDM Kabupaten dan Kecamatan | $(\sum \text{FKDM yang aktif} / \sum \text{FKDM Kab dan Kec}) \times 100\%$ | 80 | 80 | | |
| | | | | | 3 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik, demokrasi dan HAM | Persentase tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih pemula | $(\sum \text{pengguna hak pilih pemilih pemula dalam pemilu} / \sum \text{hak suara usia pemilih pemula}) \times 100\%$ | 75 | 75 | | |
| | | | | | | | Persentase peningkatan ormas/LSM yang terdaftar | $(\sum \text{Ormas yang terdaftar} / \sum \text{Ormas di Kab.Kediri}) \times 100\%$ | 80 | 80 | | |
| 3 | Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik | Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama | $\sum \text{penanganan konflik berlatar belakang agama} / \sum \text{konflik berlatar belakang agama} \times 100\%$ | 100 | 100 | 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis and saling menghormati dalam semangat keberagaman | Capaian nilai IKM Kecamatan | Hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat tiap tahun | Baik (82,12) | Baik (83) | Kecamatan |
| | | | | | | | Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi | $\sum \text{konflik yang diselesaikan} / \sum \text{konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun} \times 100\%$ | 100 | 100 | | |
| Misi 2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mempercepat pembangunan di sektor pertanian | Persentase panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik | Panjang saluran irigasi kondisi baik/panjang saluran irigasi keseluruhan $\times 100\%$ | 87,06 | 82 | 1 | Terlayannya kebutuhan air irigasi | Persentase ketersediaan air irigasi | $\sum \text{ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam} / \sum \text{kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam} \times 100\%$ | - | 68 | Dinas PU dan PR |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|--------|--|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| 2 | Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta produksi peternakan dalam rangka menjamin kecukupan bahan pangan yang aman | Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun) | $(\text{Rata-rata } \sum \text{ ketersediaan pangan utama (beras) dlm 1 th/jml penduduk})$ dalam kg/kapita/tahun | 134,92 | 141,80 | 1 | Meningkatnya ketersediaan dan akses pangan yang aman | Ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hari) dan ketersediaan protein per kapita (gram/kap/hari) | Analisis Neraca Bahan Makanan | 2.400 dan 63 | 2.400 dan 63 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan |
| | | | | Jumlah cadangan pangan utama (ton) | $\sum \text{ stok lumbung pangan}$ | | | 100 | 100 | | | |
| | | | | Persentase wilayah rawan pangan | $\sum \text{ desa rawan pangan} / \sum \text{ desa} \times 100\%$ | | | 1,16 | 0,58 | | | |
| | | | | Persentase wilayah bebas rawan pangan | $\sum \text{ desa bebas rawan pangan} / \sum \text{ desa} \times 100\%$ | | | 89,83 | 90,70 | | | |
| | | | | Stabilitas harga pangan utama di tingkat produsen | $\text{Rata-rata harga pangan utama} / \text{HPP} \times 100\%$ | | | $\geq 100\%$ | $\geq 100\%$ | | | |
| | | | | Stabilitas harga pangan utama di tingkat konsumen | $\text{Standar deviasi} / \text{Rata-rata harga pangan utama tingkat konsumen} \times 100\%$ | | | $< 10\%$ | $< 10\%$ | | | |
| | | | | Jumlah konsumsi pangan (gram/kapita/hari) | Analisis Pola Pangan Harapan (komoditas sayuran dan buah) | | | 230 | 255 | | | |
| | | | | Persentase pangan segar yang aman | $\sum \text{ pangan segar aman} / \sum \text{ sampel pangan segar} \times 100\%$ | | | 85 | 90 | | | |
| | Persentase peningkatan produksi peternakan | $(\sum \text{ produksi hasil peternakan tahun ini} - \sum \text{ produksi hasil peternakan tahun lalu}) / \sum \text{ produksi hasil peternakan tahun lalu} \times 100\%$ | | | 2 | Meningkatnya produktivitas dan populasi ternak | Produktivitas ternak | | | | | |
| | - Daging | | 0,63 | 0,73 | | | - Servive per conception | $\sum \text{ inseminasi} / \sum \text{ betina yang bunting}$ | 1,2 | 1,2 | | |
| | - Telur | | 0,55 | 0,95 | | | - Calving Interval (bulan) | Jarak kelahiran | 13,5 | 13,5 | | |
| | - Susu | | 0,64 | 4 | | | - Conception Rate (%) | $\sum \text{ betina bunting pada inseminasi ke-1} / \sum \text{ Akseptor} \times 100\%$ | 92 | 94 | | |
| | | | | | | Jumlah populasi ternak (ekor) | Hasil akumulasi data populasi ternak | | | | | |
| | | | | | | - Sapi potong | | 203.226 | 271.051 | | | |
| | | | | | | - Sapi perah | | 9.490 | 11.882 | | | |
| | | | | | - Kambing | | 137.309 | 150.895 | | | | |
| | | | | | - Domba | | 43.234 | 45.374 | | | | |
| | | | | | - Ayam Buras | | 1.297.715 | 1.392.896 | | | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---------|-------|--------------------------------|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | |
| 3 Meningkatkan produksi bahan pangan utama dan produksi hasil perkebunan | Nilai produksi bahan pangan utama | Σ produksi bahan pangan utama | 814.108 | 826.000 | 1 Meningkatkan produktivitas bahan pangan utama | Nilai produktivitas bahan pangan utama (Ton/Ha) | Σ produksi /luas panen | | | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
| | | | | | | - Padi | | 5,98 | 6,07 | |
| | | | | | | - Jagung | | 6,30 | 6,56 | |
| | | | | | | - Ubi Kayu | | 30,73 | 32,44 | |
| | | | | | | - Ubi Jalar | 34,13 | 40 | | |
| | | | | | 2 Meningkatkan produktivitas sayuran utama | Nilai produktivitas sayuran utama (Ton/Ha) | Σ produksi /luas panen | | | |
| | | | | | | - Bawang merah | | 6,93 | 7,58 | |
| | | | | | | - Cabe besar | | 4,07 | 5,18 | |
| | | | | | | - Cabe Kecil | | 4,46 | 4,96 | |
| | | | | | 3 Meningkatkan produktivitas buah-buahan | Nilai produktivitas buah-buahan (Ton/Ha) | Σ produksi /luas panen | | | |
| | | | | | | - Nanas | | 68,64 | 74,46 | |
| | | | | | | - Mangga | | 6,7 | 7,78 | |
| | | | | | | - Sirsat | | 8 | 8,85 | |
| | | | | | | - Durian | | 5 | 6,19 | |
| | | | | | | - Pepaya | | 57,23 | 61,12 | |
| | | | | | | - Pisang | | 10,29 | 11,88 | |
| | | | | | | - Nangka | | 3,88 | 4,18 | |
| | | | | | | - Rambutan | | 5 | 5,87 | |
| | | | | | | - Salak | | 15,56 | 16,79 | |
| | - Sawo | 4,56 | 4,62 | | | | | | | |
| - Alpukat | 4,99 | 6,01 | | | | | | | | |
| - Blimbing | 1,98 | 1,93 | | | | | | | | |
| - Duku | 2,89 | 6,67 | | | | | | | | |
| - Jambu Biji | 14,57 | 17,44 | | | | | | | | |
| - Jeruk | 17,6 | 36,46 | | | | | | | | |
| Nilai produksi perkebunan | Σ produksi hasil perkebunan | 238.158 | 239.480 | Meningkatnya produktivitas perkebunan | Nilai produktivitas perkebunan (Ton/Ha) | Σ produksi /luas panen | | | | |
| | | | | | - Tebu | | 107,31 | 110,02 | | |
| | | | | | - Kakao | | 0,32 | 0,33 | | |
| | | | | | - Kopi | | 0,62 | 0,71 | | |
| | | | | | - Cengkeh | | 0,17 | 0,17 | | |
| | | | | | - Kelapa | | 0,65 | 0,74 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|--|---|---|--|-------|---------|---------------------------------|---|---|---|--|-----------------|--------------|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| 4 | Meningkatkan produksi perikanan | Persentase peningkatan produksi perikanan - Kolam - Perairan umum | $(\sum \text{produksi ikan tahun ini} - \sum \text{produksi ikan tahun lalu}) / \sum \text{produksi ikan tahun lalu} \times 100\%$ | | | 1 | Meningkatnya produksi perikanan | Jumlah produksi perikanan $\sum \text{produksi ikan selama 1 tahun di 26 Kecamatan}$ | | | Dinas Perikanan | |
| | | | | 6,86 | 4,5 | | | | - Kolam (ton) | 6,86 | | 4,5 |
| | | | | 1,43 | 4 | | | | - Perairan umum (ton) | 1,43 | | 4 |
| | | | | | | | | | - Ikan hias (ribu ekor) | 3,99 | | 4,5 |
| | | | | | | | | | - Benih ikan (juta ekor) | 4 | | 4 |
| | | | | | | | | | Jumlah pembudidaya ikan | 8.280 | | 9.270 |
| | | | | | 2 | Meningkatnya konsumsi asal ikan | Jumlah konsumsi asal ikan | $\sum \text{ikan yang dikonsumsi penduduk (kg/kap/tahun)}$ | 19,15 | 21,54 | | |
| | | | | | | | Nilai tambah produk perikanan | Selisih nilai produk perikanan yang diolah dengan produk ikan segar (Rp) | - | 1.468.523.924 | | |
| Misi 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial | Persentase jumlah PMKS yang ditangani | $\sum \text{PMKS yang ditangani} / \sum \text{PMKS yang ada} \times 100\%$ | 20,61 | 23,29 | 1 | Meningkatnya pemberian bantuan untuk PMKS | Persentase jumlah PMKS yang diberi bantuan | $\sum \text{PMKS yang diberi bantuan} / \sum \text{PMKS yang ada} \times 100\%$ | 0,037 | 0,059 | Dinas Sosial |
| | | | | | | | 2 | Meningkatnya pemberdayaan PSKS | Persentase jumlah PSKS yang diberdayakan | $\sum \text{PSKS yang diberdayakan} / \sum \text{PSKS} \times 100\%$ | 10,80 | |
| 2 | Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku | Persentase Penegakan Perda dan Perbup | $\sum \text{penanganan pelanggaran perda dan Perbup} / \sum \text{pelanggaran perda dan Perbup} \times 100\%$ | 100 | 100 | 1 | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku | Persentase penegakan perda dan perbup | $\sum \text{penanganan pelanggaran perda dan Perbup} / \sum \text{pelanggaran perda dan Perbup} \times 100\%$ | 100 | 100 | Satpol PP |
| | | | | | | | | Persentase penurunan pelanggaran Perda/Perbup | $(\sum \text{pelanggaran Perda Perbup tahun lalu} - \sum \text{pelanggaran Perda Perbup tahun ini}) / \sum \text{pelanggaran perda dan perbup tahun lalu} \times 100\%$ | 84 | 95 | |
| | | | | | | | | Persentase jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang ditindak | $\sum \text{pelanggaran Perda Perbup yang ditindak} / \sum \text{pelanggaran atas Perda Perbup yang dilaporkan} \times 100\%$ | 100 | 100 | Satpol PP |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | |
|--------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------|---------|--|---|---|--------|---------------------|------|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | |
| | | | | | | Persentase pelanggaran Perda Perbup yang ditindaklanjuti | Σ pelanggaran atas Perda Perbup yang telah menyelesaikan kewajibannya setelah dilakukan penindakan/ Σ pelanggaran atas Perda Perbup yang telah ditindak X 100% | 40 | 70 | | |
| | | | | | | Cakupan patroli petugas Satpol PP perhari | Σ kelompok patroli dalam 3 kali sehari | 3x4 | 3x6 | | |
| | | | | | | Cakupan demonstrasi yang berlangsung aman dan kondusif | Σ pengamanan unjuk rasa yang berlangsung kondusif/ Σ pengamanan unjuk rasa yang dilaksanakan X 100% | 100 | 100 | | |
| | | | | | 2 | Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur tribun tranmas | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | Σ Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 1:0,35 | 1:1 | |
| | | | | | 3 | Meningkatnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat | Jumlah Satlinmas per RT | Σ Satlinmas per RT | 1:1 | 1:1 | |
| | | | | | 4 | Meningkatnya responsibilitas penanganan bahaya kebakaran | Persentase kasus kebakaran yang direspon kurang dari 15 menit | Σ kasus kebakaran yang direspon < 15 menit/ Σ kasus kebakaran yang terjadi X 100% | 100 | 100 | |
| 3 | Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat | Jumlah Desa Tangguh Bencana | Σ Desa Tangguh Bencana | - | 10 | 1 | Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi | Persentase masyarakat tangguh bencana $(\Sigma$ masyarakat terlatih tangguh bencana/ Σ penduduk pada desa rawan bencana) X 100% | 20 | 100 | BPBD |
| | | | | | | | Persentase penanganan bencana dan pemenuhan logistik kedaruratan secara cepat dan tepat | $(\Sigma$ kejadian bencana yang ditangani dalam waktu tanggap/ Σ kejadian bencana) X 100% | 20 | 100 | |
| | | | | | | | | $(\Sigma$ logistik yang dibutuhkan/ Σ logistik) X 100% | 20 | 100 | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | |
|--|---|---|---------|-------|---------|--|---|---|--------|---------------------|------------------|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | |
| | | | | | | Persentase KK terdampak yang terfasilitasi | $(\sum \text{KK yang mendapatkan bantuan} / \sum \text{KK terdampak}) \times 100\%$ | 20 | 100 | | |
| 4 | Meningkatnya koordinasi dibidang perekonomian | Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 1 | Meningkatnya koordinasi dibidang perekonomian | $(\sum \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti} / \sum \text{rekomendasi}) \times 100\%$ | - | 100 | Bagian Perekonomian | |
| | | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan | | | | | $(\sum \text{rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan} / \sum \text{rumusan kebijakan}) \times 100\%$ | 100 | 100 | Bagian Perekonomian | |
| Misi 4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan dan kualitas keluaran pendidikan | Angka harapan lama sekolah $HLS_a^t = FK \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t : Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t i : usia ($a, a+1, \dots, n$) FK : Faktor koreksi pesantren | 12,14 | 13,65 | 1 | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan | APK PAUD | | 98,38 | 98,85 | Dinas Pendidikan |
| | | | | | | | APK : | $APK_h^t = \frac{E_h^t}{P_{h,a}^t} \times 100$ Dimana, h = jenjang pendidikan a = kelompok usia t = tahun E_h^t = adalah \sum penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedangsekolah h pada jenjang pendidikan h $P_{h,a}^t$ = adalah \sum penduduk yang pada tahun t berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan h | | | |
| | | | | | | | - SD/MI | | 108,85 | 109,90 | |
| | | | | | | | - SMP/MTs | | 95,68 | 99,83 | |
| | | | | | | | APM : | | | | |
| | | | | | | | - SD/MI | | 99,48 | 99,95 | |
| | | | | | | | - SMP/MTs | | 76,14 | 80,25 | |
| | | | | | | | AL : | | | | |
| | | | | | | | - SD/MI | | 98,78 | 99,85 | |
| | | | | | | | - SMP/MTs | | 99,81 | 99,90 | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|---|---|----------------------------------|---|-----------|---------|-------------------|---|--|--|---------------------|-------|-------------------------|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| Misi 5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat | Angka Kematian Ibu | Σ wanita yang meninggal mulai dari saat hamil sampai 6 minggu setelah persalinan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/ Σ bayi lahir hidup di suatu wilayah pada kurun waktu sama X100.000 kelahiran hidup | 68,71 | 41,64 | 1 | Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan | IKM | Σ nilai IKM 37 Puskesmas/37 Puskesmas | 83,53 | 83,86 | Dinas Kesehatan |
| | | Angka Kematian Bayi | Σ kematian bayi berusia di bawah 1 tahun di suatu wilayah kerja pada kurun waktu/ Σ bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama X 1000 kelahiran hidup | 7,5 | 6,8 | | | Persentase keluarga sehat | $(\Sigma$ KK yang nilai IKS (Indeks Keluarga Sehat) > 80/ Σ KK) X 100% | 0 | 100 | Dinas Kesehatan |
| Misi 6. Menumbuhkembangkan kreativitas, produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan volume perdagangan | Nilai ekspor daerah (ribu US \$) | Nilai ekspor daerah (ribu US \$) | 17.884,35 | 119.000 | 1 | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan | Persentase pertumbuhan ekspor | $(\text{Nilai ekspor tahun ini} - \text{Nilai ekspor tahun lalu}) / \text{Nilai ekspor tahun lalu} \times 100\%$ | 8,05 | 8,35 | Dinas Perdagangan |
| 2 | Meningkatkan sektor industri | Angka pertumbuhan industri | Angka pertumbuhan industri (unit) | 2.129 | 3.550 | 2 | Meningkatnya pertumbuhan IKM | Persentase pertumbuhan IKM | $(\Sigma$ IKM tahun ini - Σ IKM tahun lalu) / Σ IKM tahun lalu X 100% | 2,16 | 2,40 | |
| 3 | Meningkatkan kemandirian keuangan daerah | Persentase peningkatan PAD | $((\Sigma$ realisasi PAD th ini - PAD th lalu) / PAD tahun lalu) X 100% | 6,41 | 4,12 | 3 | Meningkatnya pajak dan retribusi daerah | Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah | | | | Badan Pendapatan Daerah |
| | | | | | | | | - Pajak | $(\Sigma$ realisasi pajak thn ini - realisasi pajak tahun lalu) / Pajak Daerah tahun lalu X 100% | 8,95 | 5,275 | |
| | | | | | | | - Retribusi | $(\Sigma$ realisasi retribusi daerah thn ini - realisasi retribusi daerah tahun lalu) / Retribusi Daerah tahun lalu X 100% | 46,25 | 1,937 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|---|--|---|---|-------|---------|---|---|--|---|---------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| | | | | | | Hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan | Capaian IKM | Cukup | Baik | | | |
| Misi 7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kinerja sektor pariwisata | Persentase PAD sektor pariwisata | $(\sum \text{PAD sektor pariwisata di tahun berkenaan} / \sum \text{PAD}) \times 100\%$ | 18 | 28 | 1 | Terwujudnya destinasi yang berdaya saing serta berkembangnya obyek pariwisata Kab. Kediri | Jumlah kunjungan wisata yang tercatat | $\sum \text{ kunjungan wisata pada tahun yang berkenaan}$ | 1.603.679 | 2.680.440 | Dinas Pariwisata dan kebudayaan |
| | | | | | | | | Persentase peningkatan destinasi wisata | $(\sum \text{ destinasi wisata baru} / \sum \text{ destinasi wisata yang ada}) \times 100\%$ | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | Persentase tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat | $(\sum \text{ tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat} / \sum \text{ tenaga kerja kepariwisataan yang tercatat}) \times 100\%$ | 2 | 27 | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kelompok seni budaya | Persentase kelompok seni budaya yang diberdayakan | $\sum \text{ grup seni yang diberdayakan} / \sum \text{ grup terdaftar} \times 100\%$ | 40 | 52,50 | 1 | Meningkatnya revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya, sejarah dan nilai tradisi | Persentase budaya lokal yang dilestarikan | $(\sum \text{ budaya lokal yang dilestarikan} / \sum \text{ budaya lokal yang ada}) \times 100\%$ | 43 | 53 | |
| | | | | | | | | Persentase kesenian lokal yang dilestarikan | $(\sum \text{ kesenian lokal yang dilestarikan} / \sum \text{ kesenian lokal yang ada}) \times 100\%$ | 67 | 72 | |
| | | | | | | | | Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap gelar seni budaya yang diselenggarakan | Indeks kepuasan masyarakat terhadap gelar seni budaya yang diselenggarakan | Sedang | Baik | |
| | | | | | | | | Persentase cagar budaya yang dilestarikan | $(\sum \text{ benda cagar budaya yang dilestarikan} / \sum \text{ benda cagar budaya yang ada}) \times 100\%$ | 100 | 100 | |
| 3 | Melaksanakan penelitian dan pengembangan | Meningkatnya kinerja penelitian dan pengembangan | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan | 0 | 4 | 1 | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan | $(\sum \text{ hasil penelitian yang dimanfaatkan} / \sum \text{ hasil penelitian Badan}) \times 100\%$ | 25 | 50 | Balitbangda |
| Misi 8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomikerakyatan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Koperasi | Persentase koperasi sehat | $\sum \text{ koperasi sehat} / \sum \text{ koperasi} \times 100\%$ | 87 | 87,60 | 1 | Meningkatnya kualitas kelembagaan, usaha dan kinerja koperasi | Persentase koperasi aktif | Jml koperasi aktif/jml koperasi X 100% | 68,07 | 71 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| | | | | | | | | Persentase koperasi hasil binaan yang mendapat peningkatan predikat | $\sum \text{ koperasi yang mendapat peningkatan predikat} / \sum \text{ koperasi binaan tahun dasar} \times 100\%$ | 0,34 | 5,03 | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|--|--|---|--|------------|------------|-------------------|---|---|--|---------------------|--------|--|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| 2 | Meningkatnya jumlah dan kualitas serta volume usaha mikro | Persentase pertumbuhan usaha mikro | Σ UM tahun ini- Σ UM tahun lalu/ Σ UM tahun dasar | 0,68 | 3,39 | 1 | Meningkatnya jumlah dan kualitas serta volume usaha mikro | Persentase peningkatan wirausaha baru | $(\Sigma$ wirausaha baru tahun ini- Σ wirausaha baru tahun lalu)/ Σ wirausaha baru tahun dasar X 100% | 52,41 | 262,03 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| | | | | | | | | Persentase Usaha Mikro yang berijin | Σ usaha mikro yang berijin/ Σ usaha mikro yang dibina X 100% | 2,44 | 4,72 | |
| | | | | | | | | Persentase Usaha Mikro hasil binaan yang omsetnya meningkat | Σ usaha mikro binaan yang omsetnya meningkat/ Σ usaha mikro binaan tahun dasar X 100% | 50 | 71,31 | |
| Misi 9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan investasi di daerah | Nilai Realisasi Investasi (milyar rupiah) | Nilai Realisasi Investasi (milyar rupiah) | 418,259894 | 533,365637 | 1 | Meningkatnya kinerja penanaman modal dan pelayanan perizinan di daerah | Persentase pertumbuhan investasi di daerah | $(\text{Nilai investasi tahun } (n)-\text{Nilai investasi (tahun } n-1))/\text{investasi (tahun } n-1) \times 100\%$ | 7,12 | 3 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | | | | | | | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan | Capaian IKM | 73,41 | 76 | |
| Misi 10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan pelayanan keluarga berencana | Prevalensi peserta KB Aktif | Σ peserta KB Aktif/ Σ pasangan usia subur X 100% | 70,81 | 72,50 | 1 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencapaian KB MKJP dan pembangunan keluarga | Persentase peserta KB aktif MKJP | Σ peserta KB Aktif MKJP/ Σ peserta KB Aktif X 100% | 21,20 | 30 | Dinas Pengendalian Penduduk, KBP3A |
| | | | | | | | | Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB | Σ PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB/ Σ PUS anggota kelompok BKB, BKR dan BKL X 100% | | | |
| | | | | | | | | - BKB | | 83,99 | 85 | |
| | | | | | | | | - BKR | | 83,21 | 84,50 | |
| - BKL | | 78,72 | 81 | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | $1/3[\text{Ipar}+\text{IDM}+\text{linc-dist}]$ | 74,09 | 74,39 | 1 | Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A | Σ kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani/ Σ kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan X 100% | 100 | 100 | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|---|---|--|---|--|---|-----------------------|--|--|--|---------------------|------|--|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| 3 | Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan | Persentase BUMDes yang aktif | $\frac{\sum \text{BUMDes yang aktif}}{\sum \text{BUMDes seluruhnya}} \times 100\%$ | - | 13,9 | 1 | Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa | Jumlah BUMDes yang terbentuk | $\sum \text{BUMDes yang aktif}$ | 8 | 48 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| | | | | Jumlah kawasan perdesaan yang ditetapkan | $\sum \text{kawasan perdesaan yang telah ditetapkan dengan SK Bupati}$ | | 1 | 5 | | | | |
| | | Jumlah desa tertinggal | $\sum \text{desa tertinggal}$ | 113 | 103 | 2 | Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Desa | $\sum \text{desa yang melaksanakan musrenbang desa}$ | 343 | 343 | |
| | | | | | | | | Jumlah Pelaksanaan gotong royong masyarakat | $\sum \text{desa yang melaksanakan gotong royong masyarakat}$ | 343 | 343 | |
| | | | | | | | | Jumlah desa penerima program partisipatif masyarakat | $\sum \text{desa penerima program partisipatif masyarakat}$ | 217 | 217 | |
| | | | | | | | | Jumlah RTM Penerima bantuan | $\sum \text{kumulatif RTM Penerima bantuan}$ | 1560 | 4560 | |
| | | 3 | Meningkatnya kapasitas lembaga desa | Persentase anggota PKK yang aktif | $(\frac{\sum \text{anggota PKK aktif}}{\sum \text{anggota PKK yang ada}}) \times 100\%$ | 86 | 100 | Jumlah LPMD yang aktif | $\sum \text{LPMD yang aktif}$ | 1029 | 1029 | |
| | | | | | | Jumlah KPM yang aktif | $\sum \text{KPM yang aktif}$ | | | 686 | 686 | |
| | | | | | | | | | | 50 | 100 | |
| | | 4 | Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa | Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai ketentuan | $(\frac{\sum \text{laporan keuangan yang baik}}{\sum \text{desa}}) \times 100\%$ | | | | | | | |
| Misi 11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP | CC | A | 1 | Meningkatnya akuntabilitas pemerintah disertai budaya kerja | Persentase SAKIP PD yang berpredikat B | $(\frac{\text{SAKIP PD berpredikat B}}{\sum \text{PD}}) \times 100\%$ | | | Bagian Organisasi |
| | | | | | | | | Persentase PD yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK) | $(\frac{\text{PD yang memiliki KBK}}{\sum \text{PD}}) \times 100\%$ | 25 | 75 | |
| 2 | Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan | Persentase OPD Pelayanan yang mendapat nilai IKM kriteria baik | $\frac{\text{OPD Pelayanan yang mendapat nilai IKM kriteria baik}}{\sum \text{OPD pelayanan}} \times 100\%$ | 75 | 95 | 1 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta kesesuaian standar kompetensi manajerial | Persentase kelembagaan PD yang tepat sesuai peraturan yang berlaku | $(\frac{\text{Kelembagaan PD yang telah dibentuk sesuai peraturan yang berlaku}}{\text{Jumlah PD yang seharusnya dibentuk sesuai peraturan yang berlaku}}) \times 100\%$ | 100 | 100 | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|--------|---|--|--|-------|---------|---|---|--|--|---------------------|-----|---------|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| | | | | | | | | | | Bagian Organisasi | | |
| | | | | | | Persentase PD yang telah dilakukan Anjab dan ABK | $(\sum \text{PD yang dilakukan Anjab} / \sum \text{PD}) \times 100\%$ | 100 | 100 | | | |
| | | | | | | Persentase PD yang telah disusun Standar Kompetensi Manajerial | $(\sum \text{PD telah disusun SKM} / \sum \text{PD}) \times 100\%$ | 50 | 100 | | | |
| | | | | | 2 | Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang ketatalaksanaan | $(\text{Peraturan ketatalaksanaan yang telah disusun dan diterapkan sesuai ketentuan} / \sum \text{peraturan ketatalaksanaan yang seharusnya disusun sesuai peraturan yang berlaku}) \times 100\%$ | 100 | | 100 | |
| | | | | | | Persentase PD yang telah menyusun SOP | $(\text{PD yang menyusun SOP} / \sum \text{PD}) \times 100\%$ | 100 | 100 | | | |
| | | | | | | Persentase PD yang mendapatkan nilai IKM kriteria baik | $(\text{Capaian IKM PD yang membidangi pelayanan dengan nilai baik} / \sum \text{PD yang membidangi pelayanan}) \times 100\%$ | 77 | 85 | | | |
| | | | | | | Persentase PD yang telah menyusun laporan capaian SPM sesuai peraturan yang berlaku | $(\sum \text{PD yang telah menyusun capaian SPM} / \sum \text{PD yang seharusnya menyusun capaian SPM sesuai peraturan yang berlaku}) \times 100\%$ | 65 | 90 | | | |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP | CC | A | 1 | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah | Opini BPK | Opini BPK | WDP | WTP | BPKAD |
| 4 | Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan | Persentase indikator sasaran pada RPJMD yang targetnya terpenuhi | $(\sum \text{indikator yang mencapai } 80\% / \sum \text{total indikator}) \times 100\%$ | N/A | 80 | 1 | Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan dan ketersediaan data informasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan | Persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD | $(\sum \text{program RKPD tahun berkenaan} / \sum \text{program di RPJMD tahun berkenaan}) \times 100\%$ | N/A | 95 | Bappeda |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|--------|---|----------------------------|--|-------|---------|--|---|--|--|---------------------|-------------|----------------|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| | | | | | | Persentase PD yang dokumen Renja selaras dengan Renstra | $(\sum \text{PD yang program di Renja selaras dengan program di Renstra di atas } 75\%) / \sum \text{PD} \times 100\%$ | N/A | 95 | Bappeda | | |
| | | | | | | Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | $(\sum \text{dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu} / \sum \text{dokumen perencanaan yang disusun}) \times 100\%$ | N/A | 100 | | | |
| | | | | | | Persentase data dan informasi pembangunan yang dimanfaatkan <i>stakeholder</i> | $(\sum \text{data informasi pembangunan yang dimanfaatkan} / \sum \text{data informasi yang tersedia}) \times 100\%$ | N/A | 90 | | | |
| 5 | Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan | Nilai SAKIP | Kategori nilai atas implementasi SAKIP | CC | A | 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan dan aset pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri | Persentase laporan keuangan pada PD sesuai SAP $\sum \text{LK pada PD yang sesuai SAP} / \sum \text{LK PD yang direviu} \times 100\%$ | 90 | 100 | Inspektorat | |
| | | | | | | | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | $\sum \text{pengaduan yang ditindaklanjuti} / \sum \text{pengaduan yang masuk} \times 100\%$ | 95 | 100 | | |
| | | | | | | | Persentase temuan hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti | $\sum \text{temuan HP yang selesai ditindaklanjuti} / \sum \text{temuan HP} \times 100\%$ | 80 | 100 | | |
| | | | | | | | Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai evaluasi atas implementasi SAKIP minimal B | $\sum \text{PD yang mendapat nilai "B" ke atas} / \sum \text{PD yang dievaluasi} \times 100\%$ | 80 | 100 | | |
| | | | | | | | Tingkat Kapabilitas APIP | Indeks capaian (penilaian dari BPKP) | Level 1 | Level 4 | | |
| 6 | Meningkatkan pelayanan umum pemerintahan | Survei Kepuasan Masyarakat | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat | - | B | 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan di Bagian Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | - | B | Bagian Umum |
| 7 | Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelayanan | IKM | Nilai IKM | Baik | Baik | 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Baik | Baik | Dispendukcapil |
| | | | | | | | Persentase kepemilikan KTP El | $(\sum \text{pddk yang ber-KTP El} / \sum \text{penduduk usia } > 17 \text{ atau telah menikah}) \times 100\%$ | 85,27 | 100 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|--------|--|--|--|-------|---------|---|--|--|---|---------------------|---|-----|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| | | | | | | Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk | $(\sum \text{pddk yang mempunyai akta kelahiran} / \sum \text{pddk yang wajib ber akta kelahiran}) \times 100\%$ | 62,60 | 63 | Dispendukcapil | | |
| | | | | | | Persentase penduduk wajib KK yang memiliki KK | $(\sum \text{penduduk yang memiliki KK} / \sum \text{penduduk yang wajib ber KK}) \times 100\%$ | 95,96 | 96 | | | |
| | | | | | | Persentase pasangan berakta perkawinan | $(\sum \text{pasangan yang berakta nikah} / \sum \text{pasangan nikah}) \times 100\%$ | 100 | 100 | | | |
| | | | | | | SKM Layanan adminduk | Nilai SKM | - | Baik | | | |
| | | | | | | Persentase bayi berakta kelahiran | $(\sum \text{bayi yang mempunyai akta kelahiran} / \sum \text{bayi lahir}) \times 100\%$ | 97,45 | 100 | | | |
| 8 | Meningkatkan profesionalitas ASN | Indeks Profesionalitas ASN | $\sum \text{IP ASN seluruh unit organisasi} / \sum \text{unit organisasi}$ | - | 86 | 1 | Meningkatnya kompetensi dan kinerja ASN | Persentase pejabat struktural yang telah diklatpim sesuai jenjangnya | $(\sum \text{pejabat struktural yang telah diklatpim sesuai jenjangnya} / \sum \text{pejabat struktural}) \times 100\%$ | 67,52 | 93,09 | BKD |
| | | | | | | | | Persentase ASN yang mendapat penilaian prestasi kerja minimal baik | $(\sum \text{ASN yang mendapat penilaian prestasi kerja minimal baik} / \sum \text{ASN}) \times 100\%$ | 90 | 95 | |
| | | | | | | | | Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya | $(\sum \text{ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya} / \sum \text{ASN}) \times 100\%$ | 75 | 85 | |
| | | | | | | | | Persentase ASN yang lulus uji kompetensi | $(\sum \text{ASN yang lulus uji kompetensi} / \sum \text{ASN}) \times 100\%$ | 75 | 85 | |
| | | | | | | 2 | Meningkatnya kualitas layanan administrasi di bidang kepegawaian | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) | Capaian Nilai SKM | 80 | 90 | |
| | | | | | | | | Persentase pengelolaan data ASN yang akurat dan up to date | $(\sum \text{data ASN yang akurat dan up to date} / \sum \text{data seluruh ASN}) \times 100\%$ | 91 | 95 | |
| 9 | Meningkatkan tertib administrasi pembangunan | Persentase tingkat penyerapan anggaran OPD di atas 80% | $(\sum \text{OPD dengan tingkat penyerapan anggaran di atas } 80\% / \sum \text{OPD yang ada}) \times 100\%$ | 80,27 | 85 | 1 | Meningkatnya serapan anggaran OPD di atas 80% | $(\sum \text{OPD dengan tingkat penyerapan anggaran di atas } 80\% / \sum \text{OPD yang ada}) \times 100\%$ | 80,27 | 85 | Bagian Adm. Pembangunan dan Layanan Pengadaan | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | |
|--------|--|---|---------|-------|---------|--|---|---|-------|---------------------|---|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | |
| | Persentase paket pengadaan barang/jasa yang prosesnya sesuai perundangan/pedoman | $(\sum \text{paket pengadaan barang atau jasa yang prosesnya sesuai perundangan atau pedoman} / \sum \text{pengadaan barang atau jasa yang diterima ULP}) \times 100\%$ | 90 | 100 | 2 | Meningkatnya paket pengadaan barang/jasa yang prosesnya sesuai dengan perundangan/pedoman | Persentase paket pengadaan barang/jasa yang prosesnya sesuai perundangan/pedoman | $(\sum \text{paket pengadaan barang atau jasa yang prosesnya sesuai perundangan atau pedoman} / \sum \text{pengadaan barang atau jasa yang diterima ULP}) \times 100\%$ | 90 | 100 | Bagian Adm. Pembangunan dan Layanan Pengadaan |
| | Persentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang menjadi kebijakan | $(\sum \text{rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan} / \sum \text{rumusan kebijakan}) \times 100\%$ | 100 | 100 | 3 | Tercapainya rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang menjadi kebijakan | Persentase rumusan kebijakan administrasi pembangunan yang menjadi kebijakan | $(\sum \text{rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan} / \sum \text{rumusan kebijakan}) \times 100\%$ | 100 | 100 | |
| 10 | Mewujudkan kualitas produk hukum dan kepastian hukum serta kesadaran masyarakat | Persentase penyelesaian produk hukum | 80 | 95 | 1 | Meningkatnya produk hukum yang berkualitas | Persentase produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum dan selesai tepat waktu | $(\sum \text{produk hukum yang sesuai dengan kaidah hukum} / \sum \text{produk hukum yang ditangani}) \times 100\%$ $(\sum \text{produk hukum yang selesai tepat waktu} / \sum \text{produk hukum yang dibahas}) \times 100\%$ | 100 | 100 | Bagian Hukum |
| | | | | | | Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat | $(\sum \text{produk hukum yang tidak dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat} / \sum \text{produk hukum yang ada}) \times 100\%$ | 100 | 100 | | |
| | | | | | 2 | Terselesainya kasus hukum, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan penyuluhan hukum dan Kadarkum | Persentase kasus hukum yang diselesaikan | $(\sum \text{kasus hukum yang diselesaikan} / \sum \text{kasus hukum yang ditangani}) \times 100\%$ | 80 | 95 | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | | |
|--------|-------------------------------|--|--|-------|---------|--|--|---|---|---------------------|--------------|--------------------------|--|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | | |
| | | | | | 3 | Meningkatnya pengkajian produk hukum dan pengelolaan dokumentasi produk hukum yang berkualitas | Persentase produk hukum yang dipublikasikan | $(\sum \text{produk hukum yang dipublikasikan} / \sum \text{produk hukum yang ada}) \times 100\%$ | 100 | 100 | Bagian Hukum | | |
| | | | | | | Persentase Pemdes yang mampu menyusun Raperdes | $(\sum \text{Pemdes yang mampu menyusun Raperdes} / \sum \text{Pemdes yang ada}) \times 100\%$ | 100 | 100 | | | | |
| | | | | | | Jumlah laporan Rencana Aksi HAM | $(\sum \text{laporan Rencana Aksi HAM} / \sum \text{penanganan laporan Rencana Aksi HAM}) \times 100\%$ | - | 100 | | | | |
| 11 | Meningkatnya kerjasama daerah | Jumlah Perjanjian kerjasama hasil tindak lanjut dari kesepakatan bersama | \sum kumulatif Perjanjian kerjasama hasil tindak lanjut dari kesepakatan bersama | 6 | 52 | 1 | Meningkatnya kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama untuk peningkatan pelayanan publik | Jumlah Perjanjian kerjasama hasil tindak lanjut dari kesepakatan bersama | \sum kumulatif Perjanjian kerjasama hasil tindak lanjut dari kesepakatan bersama | 6 | 52 | Bagian Adm. Pemerintahan | |
| | | | | | | 2 | Terwujudnya penetapan batas daerah yang definitif untuk kepastian hukum dan kepastian wilayah administrasi | Persentase penetapan batas daerah yang sudah berkekuatan hukum | $\sum \text{penetapan batas daerah yang sudah berkekuatan hukum} / \sum \text{penetapan batas daerah yang seharusnya} \times 100\%$ | 16,7 | 100 | | |
| | | | | | | 3 | Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembakuan nama rupa bumi (toponimi) | Status penyelesaian pembakuan nama-nama unsur rupa bumi | Ada/Belum ada pembakuan nama-nama unsur rupa bumi (toponimi) | Belum ada | Ada | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|--|--|--|--|-------|---------|---|--|--|--|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| | | | | | 4 | Meningkatnya peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten secara nasional | Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten secara nasional | Peringkat dan status kinerja berdasarkan SK Mendagri | 3,0005 | 3,1928 | Bagian Adm. Pemerintahan | |
| 12 | Meningkatnya fasilitasi dalam mendukung kinerja DPRD | Indeks kepuasan DPRD | Hasil survey Indeks Kepuasan DPRD | 70 | 80 | 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD | Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Hasil survey Indeks Kepuasan DPRD | 70 | 80 | Sekretariat DPRD |
| 13 | Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan perpustakaan | Persentase OPD yang menerapkan penyelenggaraan kearsipan secara baku | Σ OPD dan BUMD yang sudah menyelenggarakan kearsipan sesuai standar/ Σ OPD dan BUMD X 100% | 21,43 | 60,56 | 1 | Meningkatnya pengelolaan arsip pemerinth daerah yang tertib, rapid an handal | Persentase OPD yang menerapkan penyelenggaraan kearsipan secara baku | Σ OPD dan BUMD yang sudah menyelenggarakan kearsipan sesuai standar/ Σ OPD dan BUMD X 100% | 21,43 | 60,56 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| | | IKM | | 70 | 80 | 2 | Terwujudnya masyarakat Kab.Kediri gemar membaca | Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan | $(\Sigma$ pengunjung tahun ini)- $(\Sigma$ pengunjung tahun lalu)/ Σ pengunjung tahun lalu X 100% | 10 | 61 | |
| | | | | | | | | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | (total koleksi buku tahun lalu) + $(\Sigma$ penambahan buku tahun ini | 30.796 eks | 38.093 eks | |
| Misi 12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mewujudkan pembangunan infrastruktur guna menunjang pembangunan berbagai bidang | Persentase infrastruktur daerah dalam kondisi baik | Σ Infrastruktur dalam kondisi baik/ Σ infrastruktur X 100% | 86 | 95 | 1 | Terwujudnya jalan yang handal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | Jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang /panjang jalan kabupaten seluruhnya X 100% | - | 71,37 | Dinas PU dan PR |
| | | | | | | 2 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasil guna dan berdaya guna | Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR yang ditetapkan | Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR/Pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dalam 1 tahun X 100% | N.A | 100 | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|--------|--|---|---|-------|---------|-------------------|--|--|--|---------------------|----|--|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| | | Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak | Σ penduduk pengguna air minum yang memenuhi syarat/ Σ penduduk X 100% | 50 | 95 | 3 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih | Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih | Σ rumah tangga atau KK yang terlayani air bersih/ Σ KK di Kab. Kediri X 100% | 50 | 95 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | | Persentase penurunan luasan kawasan kumuh | Luas kawasan kumuh yang ditangani/luas kawasan kumuh yang ada X 100% | 100 | 0 | 4 | Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan | Persentase KK yang memiliki Rumah Layak Huni | Σ KK yang memiliki rumah layak huni/ Σ KK di Kab. Kediri X 100% | 70 | 80 | |
| | | | | | | | Persentase PJU dalam kondisi baik | Σ PJU dalam kondisi baik dan menyala/ Σ PJU yang ada X 100% | 80 | 95 | | |
| | | | | | | | Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi | Σ bangunan gedung pemerintahan layak fungsi/ Σ bangunan gedung pemerintahan yang ada X 100% | 60 | 90 | | |
| | | | | | | | Luasan kawasan kumuh yang tertangani | Luas kawasan kumuh yang ditangani | 0 | 25,98 | | |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah | Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan publik perhubungan | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | - | 77 | 1 | Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terjangkau | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan publik perhubungan | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | N/A | 77 | Dinas Perhubungan |
| | | | | | | | Persentase angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi, dan laik jalan kendaraan | Σ angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar tonase, dimensi dan laik jalan/ Σ angkutan barang bermuatan yang terjaringoperasi LLAJ X 100% | N/A | 87,50 | | |
| | | | | | | | Persentase perkembangan penumpang di Terminal Pare | Σ penumpang naik dan turun di terminal Pare pada tahun n/ Σ penumpang naik dan turun di terminal Pare pada tahun (n-1) X 100% | N/A | 92,90 | | |
| | | | | | | | Persentase Mobil Penumpang Umum Pedesaan berizin trayek yang masih beroperasi | Σ MPU pedesaan berizin trayek yang beroperasi/ Σ MPU pedesaan yang memiliki izin trayek X 100% | N/A | 73,64 | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|--|--|--|-----------------------|-------|-----------|---|--|---|--|---------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| | | | | | | Persentase angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan (Uji KIR) | Σ angkutan jalan yang lulus uji kir di tahun n / Σ angkutan jalan yang wajib uji kir di tahun $n \times 100\%$ | N/A | 94 | Dinas Perhubungan | | |
| | | | | | | Persentase pemenuhan SDM Penguji Kendaraan Bermotor sesuai standar kompetensi teknis pengawas laik jalan kendaraan bermotor | Σ SDM penguji berkompotensi teknis yang ada / Σ kebutuhan SDM penguji kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar kompetensi teknis $\times 100\%$ | N/A | 100 | | | |
| | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan | Σ pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan / Σ pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan transportasi jalan yang seharusnya $\times 100\%$ | - | 88,50 | 2 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan yang ramah lingkungan dan mengikuti perkembangan teknologi | Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan | Rata-rata persentase perlengkapan jalan | N/A | 77 | | |
| | | | | | | Jumlah ketersediaan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor di wilayah Kab. Kediri | Σ lokasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor | 1 | 2 | | | |
| Misi 13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah | Nilai pemeringkatan e-government di tingkat Provinsi | (nilai dari Provinsi) | 2,83 | 3,66 | 1 | Meningkatnya OPD yang berbasis e-government | Persentase OPD yang berbasis e-government | Σ OPD yang berbasis e-government / Total OPD $\times 100\%$ | 8,5 | 100 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | | Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi | Σ ruang publik yang terlayani free wifi | 66 | 100 | | |
| | | | | | | | Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab | Hasil test speed konektivitas internet (Mbps) | 20 | 50 | | |
| 2 | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap informasi publik | Hasil survey IKM | - | Baik (70) | 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik | Persentase desa yang membentuk KIM | Desa yang membentuk KIM / Total Desa $\times 100\%$ | 3,4 | 100 | |
| | | | | | | | Persentase PPID aktif pada OPD | PPID aktif / Total PPID $\times 100\%$ | 5,5 | 100 | | |
| | | | | | | 2 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah | Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi | Σ hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi | 240 per tahun | 480 per tahun | |
| | | | | | | | Jumlah update pada media pemerintah daerah | Σ update / 24 jam | 1x | 4x | | |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Formula | Kondisi | | Sasaran | Indikator Sasaran | Formula | Kondisi | | PD Penanggung Jawab | | |
|---|---|--|--|-------|---------|--|--|---|--|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Awal | Akhir | | | | Awal | Akhir | | | |
| | | | | | | Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab | Σ pengunjung website resmi milik Pemkab | 16 jt/th | 20 jt/th | Dinas Komunikasi dan Informatika | | |
| Misi 14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan kualitas lingkungan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Rata-rata nilai IKA, IKU, ITL | - | 65 | 1 | Meningkatnya kualitas lingkungan | Indeks Kualitas Air | Nilai IKA | - | 52 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | | | | Indeks Kualitas Udara | Nilai IKU | - | 88 | |
| | | | | | | 2 | Meningkatnya penanganan persampahan | Persentase penanganan persampahan | Volume sampah ditangani/volume produk sampah di daerah layanan X 100% | 16,51 | 23 | |
| | | | | | | | | 3 | Meningkatnya luasan RTHKP | Angka luasan RTHKP | Akumulasi luasan RTHKP | |
| Misi 15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja | Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerja | Angkatan Kerja 15 th ke atas/ Σ penduduk usia 15 th ke atas X 100% | 57 | 67 | 1 | Meningkatnya produktivitas dan penempatan tenaga kerja | Persentase pencari kerja yang ditempatkan | $(\Sigma$ pencari kerja yang ditempatkan/ Σ pencari kerja yang terdaftar) X 100% | 82 | 87 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | | | | Persentase tenaga kerja terampil | Σ lulusan pelatihan/ Σ peserta pelatihan X 100% | 80 | 85 | |
| 2 | Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja | Persentase peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma jamsostek | Σ perusahaan yang menerapkan norma jamsostek tahun ini-tahun lalu/ Σ perusahaan yang menerapkan norma jamsostek tahun ini X 100% | 87 | 90 | 2 | Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis | Persentase perusahaan jamsostek | Σ perusahaan peserta jamsostek/ Σ perusahaan X 100% | 50 | 60 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | | | | Persentase perselisihan hubungan industrial | Σ kasus perselisihan yang terselesaikan/ Σ perselisihan X 100% | 80 | 85 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan | Σ perusahaan yang memenuhi norma ketenagakerjaan/ Σ perusahaan yang ada X 100% | 80 | 85 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | | | | | Persentase perusahaan yang menerapkan UMK | Σ perusahaan yang menerapkan UMK/ Σ perusahaan yang seharusnya menerapkan UMK X 100% | 90 | 95 | Dinas Tenaga Kerja |

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


H. SUKADI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO